

Bappebti Blokir Situs Investasi Binomo

Tanggal : Sabtu , 29 Agustus 2020

Media : Warta Kota

Halaman : 5

Wartawan : Yohana Artha Uly

Muatan Berita : Positif

Narasumber : Agus Suparmanto (*Menteri Perdagangan*), Sidharta Utama (*Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*), M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)

Rubrik : Warta Biz

Topik : Blokir Domain Entitas Ilegal

Bappebti Blokir Situs Investasi Binomo

Palmerah, Warta Kota

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 107 domain entitas di bidang perdagangan berjangka komoditas, termasuk situs Binomo.

Ada lima situs Binomo yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas permintaan Bappebti yaitu binomoapp.com, binomoidn.info, binomoofficial.com, binomotrading.com, dan binomotrading.com.

Pemblokiran dilakukan karena Binomo dan 106 entitas itu tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditas. Dengan demikian, total domain yang diblokir hingga Juli 2020 ada 692 entitas bodong.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, Bappebti secara rutin melakukan pengawasan dan pengamatan kegiatan usaha yang dilakukan entitas di bidang perdagangan berjangka komoditas, tetapi tanpa memiliki perizinan dari Bappebti.

"Hal ini penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan per-

undang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditas," ujarnya dikutip dari kompas.com, Jumat (28/8).

Wajib Izin

Sementara itu, Kepala Bappebti Sidharta Utama menegaskan, semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti, serta tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan yang sudah teregulasi oleh regulator luar negeri. Jika perusahaan tersebut melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka di Indonesia, maka wajib memiliki perizinan dari Bappebti.

Oleh sebab itu, ia memastikan Bappebti akan melakukan pemblokiran secara rutin agar situs-situs broker luar negeri tidak dapat diakses masyarakat Indonesia.

"Pemblokiran juga dilakukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka," tegas Sidharta.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M Syist menambahkan, saat ini masih marak penawaran investasi ilegal di

bidang perdagangan berjangka komoditas.

Secara garis besar, penawaran investasi tersebut dapat dikategorikan dengan investasi berkedok perdagangan berjangka, dan investasi perdagangan berjangka komoditas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

"Semua pihak harus memahami bahwa kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka komoditas di Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti, termasuk penawaran produk kontrak berjangka dan kontrak derivatif lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun ada pihak yang mengaku telah teregulasi regulator luar negeri, apabila tidak memiliki perizinan dari Bappebti maka pihak tersebut dan pihak-pihak yang mewakilinya di Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditas di Indonesia.

Syist mengimbau masyarakat tidak mudah percaya penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan tinggi, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian tinggi (*high risk high return*).
(Yohana Artha Uly)